

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rangkaian acara edisi ke-enam Choose France Summit diadakan pada 15 Mei 2023 di Istana Versailles, Paris dan dihadiri oleh 200 pemimpin bisnis dari berbagai negara di dunia (Bezat, 2023). Pertemuan ini rutin diadakan setiap tahun sejak pertama kali dilaksanakan pada 2018 oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron untuk mempromosikan daya tarik Prancis kepada investor internasional (Goncalves, 2025). Sebelum pertemuan puncak tersebut, Macron telah menemui beberapa investor utama seperti Elon Musk dan investor Tiongkok, XTC, di Dunkirk serta membicarakan ambisi dan kapabilitas Prancis untuk melakukan ‘reindustrialisasi’ lebih luas (Reuters, 2023).

Melalui pidato bertema reindustrialisasi Prancis yang disampaikan di Istana Elysees pada 11 Mei 2023, Macron menyampaikan perlunya sebuah ‘*European regulatory pause*’ atau ‘jeda regulasi Eropa’ dalam kaitannya dengan peraturan lingkungan (Di Sario & Leali, 2023). Macron berargumen dalam pidatonya bahwa Eropa telah membuat banyak regulasi lingkungan, lebih dari negara-negara lain di dunia termasuk negara industri besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok (Di Sario & Leali, 2023). Penambahan aturan baru terkait lingkungan oleh UE hanya akan membentuk resiko hilangnya pendanaan dan investasi pada berbagai sektor. UE juga

harus dapat mempertahankan diri dalam kompetisinya dengan negara-negara industri besar tersebut.



Gambar 1. 1. Emmanuel Macron menerangkan rancangan kebijakan untuk menahan merosotnya ekonomi Prancis melalui pidatonya di Paris, 11 Mei 2023.
Sumber: AFP (2023)

Pernyataan ini menarik atensi dan mendapat reaksi yang beragam dari media serta politisi pada skala nasional Prancis dan UE. Ketidaksetujuan datang dari kelompok aktivis lingkungan dan anggota parlemen UE dari sayap kiri dan tengah-kiri. Di antaranya adalah Marine Tondellier, sekretaris nasional Partai Ekologis Prancis (Les Ecologistes) dan anggota Partai Ekologis lainnya yang juga merupakan anggota Parlemen Eropa periode 2019-2024, David Cormand (AFP & Connaissance des Energies, 2023). Volt Europa, partai beraliran tengah-kiri di Parlemen Eropa menyatakan kekhawatirannya bersama dengan beberapa organisasi non-pemerintah. Volt menyebut posisi yang diambil Macron hanya akan memberi argumen baru bagi pihak-pihak yang ingin membatasi ambisi perlindungan lingkungan UE terutama dari

kelompok sayap kanan (Szlingier, 2023). Istilah ‘jeda regulasi’ kemudian mulai digunakan oleh beberapa partai politik yang berada pada posisi tengah-kanan. Salah satunya dalam pernyataan resmi konferensi umum European’s People Party (EPP) pada Juni 2023 (EPP, 2023). Meskipun menganggap perlindungan lingkungan sebagai suatu hal yang penting, EPP juga menyuarkan moratorium atau jeda regulasi serta penolakan terhadap beberapa proposal regulasi lingkungan dalam bentuknya saat itu atas alasan kompetisi industri dan produktivitas/ketahanan pangan dalam sektor agrikultur.

Uni Eropa memiliki Kesepakatan Hijau Eropa atau *European Green Deal* (EGD) yang diresmikan dan menjadi salah satu program prioritas pada putaran pertama masa kepemimpinan Ursula von der Leyen di UE pada 2019 (European Commission, n.d.-j). EGD berfokus pada perlindungan lingkungan yang menargetkan sektor-sektor ekonomi, energi, transportasi, dan industri Eropa untuk masa depan yang lebih berkelanjutan (European Commission, n.d.-j). Melalui EGD, UE menargetkan pemotongan emisi hingga setidaknya 50% pada 2030 dan naik hingga 55% bersamaan dengan target netralitas karbon pada 2050 berdasarkan European Climate Law.

Untuk mendukung target-target EGD di bidang industri, *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD) atau direktif uji tuntas keberlanjutan korporasi resmi diberlakukan oleh Uni Eropa pada 25 Juli 2024 (European Union, n.d.-b). Tujuan dari direktif ini adalah untuk memelihara kegiatan korporasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam operasinya dan pada keseluruhan rantai

nilai mereka (European Union, n.d.-b). Aturan terbaru akan memastikan bahwa perusahaan turut serta mengidentifikasi dan mengatasi potensi dan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan mereka di dalam dan di luar Eropa. CSDDD melengkapi direktif yang diresmikan pada 2022 yaitu Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) atau direktif terkait pelaporan agenda keberlanjutan perusahaan (Mays & Daphne, 2024).

Satu tahun berselang melalui surat yang diterbitkan oleh Otoritas Prancis kepada Uni Eropa tertanggal 20 Januari 2025, Prancis menyampaikan 19 poin rekomendasi simplifikasi regulasi dan beberapa penundaan implementasi berkaitan dengan industri di Uni Eropa (French Authorities, 2025). Surat ini menggunakan data dan laporan oleh Draghi pada 2024, Mantan Presiden Bank Sentral Eropa terkait lambatnya pertumbuhan industri UE dibandingkan dengan AS dan Cina (French Authorities, 2025). Draghi juga menyebutkan dalam praktik pencapaian target lingkungan EGD, Eropa semakin bergantung dengan produk ramah lingkungan Cina seperti mobil listrik dan panel surya yang banyak diimpor dari negeri tersebut dan mengancam produsen lokal (Draghi, 2024). Surat tersebut menggunakan istilah yang sama dengan Macron yaitu perlunya ‘jeda regulasi masif’ dalam beberapa waktu hingga Eropa dapat mengejar ketertinggalan dari AS dan Cina.

Di bidang agrikultur, prinsip dan kerangka EGD memastikan aktivitas agrikultur tidak berpengaruh buruk terhadap keberagaman hayati, lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat secara general. EGD juga terdapat dalam *Common*

Agricultural Policy (CAP) yang merupakan *shared competence* atau kewenangan bersama UE untuk industri agrikultur. Kewenangan bersama membagi kewenangan antara UE dan negara-negara anggota dalam implementasinya (European Union, n.d.-a). CAP secara garis besar bertujuan untuk mendorong produktivitas agrikultur, memastikan standar hidup yang layak bagi petani, stabilisasi pasar, memastikan ketersediaan suplai dan harga yang terjangkau bagi konsumen. CAP memberlakukan subsidi standar melalui Persyaratan Manajemen Wajib (*Statutory Management Requirements/SMR*) dan subsidi tambahan yang dapat diperoleh petani apabila melakukan program hijau tambahan dari standar Praktik Pertanian dan Lingkungan yang Baik (*Good Agricultural and Environmental Condition/GAEC*). Petani atau industri yang hendak mendapat dukungan dana dari pemerintah wajib memenuhi standar-standar tersebut dan bahkan mendapat insentif lebih pada revisi CAP terbaru 2023-2027 apabila dapat melampaui standar-standar SMR dan GAEC.

Dalam praktiknya, CAP banyak mendapat kritik dari pekerja dan industri agrikultur atas alasan semakin ketatnya regulasi, terutama pada reformasi terbaru CAP 2023-2027, dan sistem administrasi pencairan dana yang membebani petani (Matthews, 2024). Petani dan peternak juga mengeluhkan harga jual yang terlalu rendah, ditambah dengan masifnya komoditas impor dengan standar lingkungan di bawah UE yang masuk menimbulkan persaingan yang tidak adil dan merugikan petani Eropa (Matthews, 2024). Diskursus antara keseimbangan prioritas antara produktivitas dan tujuan-tujuan lingkungan semakin hangat dibicarakan setelah adanya gelombang

demonstrasi oleh serikat petani dan kelompok lobi agrikultur secara bersamaan di kawasan Eropa pada awal 2024.

Prancis merupakan negara produsen dan eksportir agrikultur terbesar di UE dengan hasil produksi sebesar 18% dari total keseluruhan 27 negara anggota (Agreste, 2024). Agrikultur menjadi bagian dari visi *grandeur* (kebesaran/kekuasaan) Prancis berhubungan dengan keberadaan awal European Economic Community (EEC) pertama kali. Sebagai dua negara terbesar di antara enam negara pelopor, EEC sering dinilai terwujud dengan maksud menyeimbangkan kekuatan industri dan finansial Jerman dengan agrikultur dan militer Prancis dalam rangka diversifikasi pasar Eropa (Hoffmann, 1990). Prancis menegosiasikan terbentuknya sebuah pasar bersama di bidang agrikultur, dengan pembiayaan yang berasal dari hasil industri bersama guna memastikan harga pangan yang stabil (Hoffmann, 1990). Prancis juga mengidentifikasi dirinya sebagai eksportir produk agrikultur yang secara kualitas bersifat superior.

Gelombang demonstrasi agrikultur pada awal 2024 juga terjadi di Prancis dengan adanya blockade jalan menggunakan traktor yang dilakukan oleh kelompok petani termasuk di ibukota negara (Le Monde & AFP, 2024). Demonstran juga melakukan blockade terhadap pasar modern seperti LIDL dan Leclerc, perusahaan fasilitas publik dan kantor pemerintah menggunakan limbah pertanian, serta pembuangan dan penghancuran hasil produksi di berbagai sudut Prancis (Doce et al., 2024). Tekanan dari demonstrasi ini lebih signifikan dengan adanya Olimpiade Paris yang akan diadakan dalam beberapa bulan di Juli 2024.

Secara politik, momentum pergerakan massa yang berlatar belakang pengusaha dan pekerja (petani, peternak, buruh pabrik) agrikultur secara general dimanfaatkan oleh koalisi partai sayap kanan Prancis untuk membangun narasi *anti-establishment* dan euroskeptis. Jordan Bardella, ketua umum partai ekstrem-kanan *Rassemblement National* (RN), menunjuk secara khusus pelarangan beberapa produk pestisida fitosanitasi oleh EGD yang dianggapnya berdampak terhadap kegagalan kontinental (Sulzer, 2024). Diskusi dengan kelompok industri agrikultur yang dihadiri oleh politisi sayap kanan lebih disambut baik dibandingkan dengan politisi tengah dan kiri (Rauhala & Demoustier, 2024). Meskipun masyarakat agrikultur berjumlah sebatas 2% dari keseluruhan penduduk Prancis, momentum yang dimanfaatkan oleh RN ini dapat berpengaruh terhadap pergeseran suara masyarakat Prancis secara total. Pada pemilihan umum Parlemen Eropa di Prancis pada Juni 2024, perwakilan RN di bawah Jordan Bardella memimpin dengan 31,5% suara sekaligus menjadi rekor baru bagi partai tersebut di luar pemilihan presiden (Vignal, 2024). Secara total, 40% suara diperoleh oleh perwakilan sayap kanan Prancis pada pemilu Parlemen Eropa kali ini, sebuah pukulan telak bagi aliansi tengah Macron dengan 14.5% suara.

Pergeseran posisi Prancis terhadap regulasi lingkungan UE bersifat bertahap mengikuti meningkatnya tekanan kompetisi ekonomi global, demonstrasi terhadap regulasi lingkungan tersebut secara domestik dan regional, yang kemudian menghasilkan persepsinya terhadap '*over-regulation*' yang dilakukan UE. Ketika Macron pertama kali menyerukan jeda regulasi pada 2023, kata-katanya dinilai sebagai

‘kedipan’ terhadap kelompok sayap kanan dan program mereka (Szlingier, 2023). Namun, proposal dari pemerintah Prancis pada 2025 terkait jeda regulasi masif di bidang industri, termasuk agrikultur, memperjelas posisi Prancis saat ini terhadap kebijakan lingkungan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian yang lahir adalah “Mengapa sikap Prancis berubah terhadap regulasi hijau Uni Eropa?”.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua sisi yaitu stimulus sistemik yang terjadi di luar negara serta situasi dan karakteristik domestik negara tersebut. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Prancis yaitu proposal ‘regulatory pause’ terhadap kebijakan lingkungan Uni Eropa terbentuk dipengaruhi oleh faktor sistemik dan domestik.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait analisis kebijakan luar negeri dalam konteks regional UE dan Prancis terutama dalam bidang regulasi lingkungan hidup.

1.5. KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur secara general didefinisikan sebagai deskripsi terhadap riset terdahulu untuk memetakan dan menentukan area riset, memotivasi ke arah target studi dan menjustifikasi pertanyaan riset serta hipotesis (Snyder, 2019). Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu terkait kebijakan luar negeri Prancis, literatur terkait gelombang anti-hijau dan kaitannya dengan politik agrikultur dan lingkungan Prancis, serta EGD dan dampaknya terhadap industri pada skala Prancis dan Uni Eropa.

Literatur pertama merupakan jurnal oleh Gesine Weber (2025) dengan judul '*Zeitenwende a la francaise : Continuity and change in French foreign policy after Russia's invasion of Ukraine*'. Weber menelaah kontinuitas perubahan kebijakan luar negeri Prancis terhadap keanggotaan Ukraina di UE menggunakan kaca mata realisme neoklasik pada rentang waktu 2022 hingga Konferensi Vilnius NATO pada Juni 2023. Weber menghubungkan faktor geopolitik terkait usaha balance of power antara UE dan Rusia yang dilakukan Prancis dan faktor domestik yaitu pandangan Presiden Macron dan kultur strategis didasarkan pada ide '*grandeur*' oleh Mantan Presiden Jenderal Charles de Gaulle. Tulisan ini dijadikan salah satu acuan studi kasus pergeseran posisi kebijakan luar negeri Prancis, meskipun lebih berkaitan dengan sektor keamanan dan bukan lingkungan.

Selanjutnya salah satu bab berjudul '*French climate policy : diplomacy in the service of symbolic leadership ?*' terkait kebijakan luar negeri Prancis di bidang lingkungan berjudul oleh Pierre Bocquillon dan Aurelian Evrard (2018) dari buku *The*

EU in International Climate Change Politics. Berdasarkan analisisnya, Bocquillon dan Evrard menyimpulkan bahwa sikap Prancis terhadap perubahan iklim bersifat ambigu dengan atensi yang bervariasi dan bergantung terhadap konteks politik dan ekonomi nasional serta internasional. Begitupun dengan aktor pemerintah dengan strategi yang berubah-ubah dan bergonta-ganti dari ‘bandwagoning’ pada level UE ke defensif/resisten terhadap beberapa target kebijakan dan instrumen dengan beberapa kali *bid* kepemimpinan pada tingkat UE dan internasional.

Artikel berikutnya adalah artikel oleh Sebastien Chailleux dan Andy Smith berjudul ‘*Ecological Transition in France’s Margins : How Industries Adapt to Ecological Crisis and Redefine Their National and Local Roles*’ (2024). Kedua penulis berargumen bahwa hambatan transisi ekologi secara khusus berdampak terhadap Prancis karena sistem pemerintahannya yang tersentralisasi. Struktur politik dan administratif Prancis menyulitkan teritorialisasi, seiring waktu menciptakan perpecahan geografis dan memperbesar kesenjangan. Transisi energi dan ekologis memperbesar fragmentasi dan kesenjangan geografis dan teritorial atau yang disebut sebagai margin dalam tulisan ini. Protes rompi kuning (gillets jaunes) pada 2018 dan demonstrasi agrikultur pada 2024 menjadi bukti adanya gesekan antara target-target ekologis tersentralisasi dan realitas dari penduduk yang hidup di wilayah periferi.

Lalu untuk memahami dampak EGD terhadap keberlangsungan industri dan bisnis, jurnal berjudul ‘*Impact of the European Green Deal on Business Operations*’ oleh Lamenta dan Grazybowski menemukan bahwa praktisi dan strategi serta kegiatan

perusahaan belum fokus terhadap objektif dari EGD. Korporasi mengikuti regulasi yang bersifat wajib dan menjalankan aktivitasnya didasarkan aspek ekonomi dan bukan lingkungan ataupun sosial. Penulis kemudian menjelaskan faktor yang menghambat serta memotivasi pelaku usaha untuk mengimplementasikan pedoman EGD. Penulis merekomendasikan penerapan kebijakan EGD yang lebih ketat pada level nasional dan regional yang dilihatnya sebagai stimulan satu-satunya untuk mencapai target EGD.

Berikutnya tulisan berjudul '*Green Policies, Gray Areas : Farmers' Protests and the Environmental Policy Dilemma in the European Union*' oleh Vlad Bujdei-Tebeica (2024). Artikel ini mengeksplor relasi antara gerakan anti lingkungan dan diskursus euroskeptisisme yang termanifestasi pada demonstrasi agrikultur di sekitar Eropa pada 2024 lalu menggunakan metode diskursus wacana untuk memahami *nuance* spesifik di setiap negara dengan fokus terhadap debat yang didorong oleh Common Agricultural Policy (CAP) dan European Green Deal (EGD). Vlad menemukan anti lingkungan bukan merupakan satu set dengan euroskeptisisme tetapi keduanya seringkali ada bersamaan dalam protes yang terjadi. Kekhawatiran terkait ekonomi, sosial, dan kedaulatan nasional bersinggungan dengan regulasi lingkungan yang menyebabkan lanskap kompleks terkait faktor demonstrasi di masing-masing negara.

Dan jurnal berjudul '*Dampak European Green Deal terhadap Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan di Eropa*' oleh Safira Nadhila Firdhaus. Firdhaus mengkaji bagaimana kebijakan lingkungan yang diadopsi dari EGD ke sektor pertanian melalui CAP dan strategi Farm to Fork (F2F) memberi dampak kerentanan ekonomi

dan menyulitkan petani. Hal ini menyebabkan resistensi secara sosial dan politik yang terlihat pada serangkaian protes agrikultur pada akhir 2023 hingga 2024. Diperparah dengan impor pertanian dari luar Uni Eropa yang menciptakan suatu persaingan pasar tidak seimbang dengan petani Eropa, Peneliti menelaah ketahanan pangan sebagai suatu bentuk sekuritas atau keamanan negara non-tradisional.

Dari literatur-literatur tersebut, pembahasan mengenai pergeseran posisi Prancis dalam kebijakan lingkungan Eropa dan kaitannya dengan kompetisi ekonomi dengan negara industri lain serta faktor domestiknya belum dilakukan. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa terdapatnya pengaruh dari stimuli sistemik internasional dan pengaruh dalam negeri Prancis akan adanya perubahan kebijakan luar negeri Prancis tersebut. Penulis menjadikan pemahaman ini sebagai *state of the art* penelitian.

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.6.1. Teori Realisme Neoklasik

Ilmu hubungan internasional mengenal realisme sebagai salah satu paradigma atau cara pandang dunia. Paradigma realisme adalah rumah bagi teori-teori hubungan internasional seperti teori realisme klasik, neorealisme, dan realisme neoklasik. Teori-teori ini bersifat berbeda satu sama lain namun tidak akan bertentangan dengan ide-ide umum yang dimiliki paradigma realisme.

Secara garis besar premis-premis umum realisme dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu aktor internasional, hakikat tujuan negara, dan karakteristik struktur internasional (Rosyidin, 2020). Berdasarkan aspek aktor, realisme melihat negara sebagai entitas politik serta kedaulatan sebagai otoritas tertinggi dalam interaksi internasional. Berdasarkan aspek tujuan, penganut realis melihat negara sebagai entitas yang mengutamakan kepentingannya sendiri atau bersifat *selfish*. Paradigma ini berpandangan bahwa kepentingan nasional yang dimiliki negara hanya berfokus pada dua hal yakni keamanan (*security*) dan kekuasaan (*power*). Kepentingan lain seperti ekonomi, pada akhirnya merupakan salah satu cara untuk mencapai dua kepentingan utama tersebut. Terakhir, aspek struktur internasional yang merupakan suatu system anarki dimana tidak ada entitas yang lebih tinggi dari negara. Lembaga-lembaga internasional yang ada digunakan oleh negara, kembali lagi ke aspek hakikat tujuan negara, untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Realisme klasik dipimpin dan diawali oleh pemikiran-pemikiran tokoh seperti Thucydides dengan karya tersohornya *The Peloponnesian War* dan kutipannya '*The strong do what they can, the weak suffer what they must.*' Ungkapan ini menggambarkan pandangan dari kaum realis bahwa negara yang kuat akan memiliki kecenderungan menjadi agresif dan melakukan ekspansi sekedar didasari kepemilikan kekuatan yang lebih besar belaka (Rosyidin, 2020). Hal ini serupa dengan pandangan Morgenthau, tokoh realisme klasik modern yang melihat kekuatan sebagai *end* atau tujuan utama suatu negara sehingga kecuali dalam

kondisi-kondisi dimana suatu moralitas berguna bagi negara, tidak ada gunanya memperjuangkan nilai-nilai moral (Morgenthau & Thompson, 1985). Tokoh klasik lainnya adalah Macchiavelli dengan gambaran pemimpin harus memiliki sisi ‘singa’ (kekuatan) dan ‘rubah’ (muslihat). Memimpin suatu negara dengan ini tidak bisa mengikuti etika atau tata susila menurut kristianisme (cintai tetanggamu, berdamailah, hindari perang kecuali dalam keadaan melindungi diri atau dalam mengejar suatu alasan yang adil, berbagilah kepada sesama, dan sebagainya). Dengan kata lain, politik yang menentukan etika dan bukan sebaliknya.

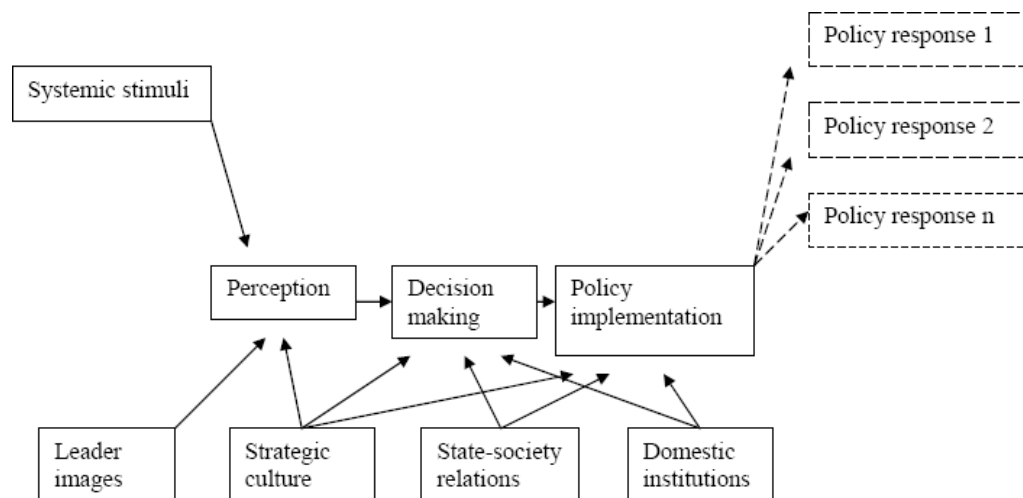
Realisme klasik mendapat kritik dari tokoh seperti Kenneth Waltz, tokoh neorealisme. Ia membantah pandangan klasik yang melihat kekuatan negara sebagai tujuan utama dengan argumen bahwa kekuatan adalah suatu alat atau disebut oleh Waltz ‘*useful means*’ karena tujuan utama negara adalah keamanan (Waltz, 1988). Kekuatan diperlukan dengan alasan kesan ‘lemah’ akan cenderung mengundang ancaman serangan dari luar. Revisi terhadap realisme klasik lebih jauh diberikan oleh Waltz perihal hubungan sebab akibat. Neorealisme menganggap argumen klasik terhadap penyebab perang terlalu berfokus pada sifat dasar manusia sehingga bersifat ‘kurang ilmiah’. Politik internasional menurut Waltz hanya dapat dipahami apabila efek dari struktur internasional ditambahkan untuk menjelaskan level unit. Struktur internasional bersifat anarki (tidak terdapat otoritas lain yang lebih tinggi) dan oleh karenanya negara harus menjamin keamanannya sendiri. Negara tetap merupakan aktor utama namun negara bersifat rasional sehingga tidak

dapat sepenuhnya dapat ditelaah melalui konsep ‘*human nature*’. Negara oleh karenanya bertindak menurut cara tertentu seperti *balancing* (dari dalam dengan memperkuat pertahanan, dari luar dengan membentuk aliansi dengan negara yang lebih kuat) dan *bandwagoning* (merapat ke sumber ancaman untuk memperoleh paying keamanan) (Rosyidin, 2020) akibat tekanan yang ada dari kondisi anarki sistem internasional.

Pada kurang lebih tiga dekade terakhir terdapat usaha untuk menghubungkan keilmuan hubungan internasional dan analisis kebijakan luar negeri yang salah satunya dilakukan melalui realisme neoklasik (Smith et al., 2016). Istilah ‘realisme neoklasik’ pertama kali digunakan oleh Gideon Rose pada review yang ia tulis atas empat buku oleh Thomas Christensen, Randall Schweller, William Wohlforth, dan Fareed Zakaria di *World Politics* yang berjudul ‘*Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*’ (Rose, 1998). Teori ini menjelaskan bagaimana faktor eksternal dan domestik sama-sama mempengaruhi keputusan negara dalam pengambilan suatu kebijakan luar negeri.

Rose menulis dalam review-nya (1998) bahwa ruang lingkup dan ambisi kebijakan luar negeri suatu negara didorong secara utama dan terpenting oleh posisinya dalam sistem internasional dan secara spesifik oleh kekuatan materi relatifnya. Hal ini berbeda dengan realisme klasik, dimana sistem internasional bersifat determinan dan secara langsung berpengaruh terhadap bagaimana negara membentuk kebijakan luar negeri. Ketiadaan otoritas yang lebih tinggi dari negara

mewajibkan negara menolong dirinya sendiri dengan melakukan akumulasi kekuatan melalui ekonomi dan militer. Sementara dalam realisme neoklasik, ambisi kebijakan luar negeri suatu negara secara pasti dan utama tetap dipengaruhi oleh kepemilikan kekuatan relatif (Rose, 1998). Kekuatan bersifat relatif karena menggambarkan hubungan antar negara. Ini berarti besar kecilnya kekuatan suatu negara akan berbeda pula pada konteks yang berlainan (Ota & Ecoma, 2022). Namun, pengaruhnya terhadap pengambilan suatu kebijakan luar negeri bersifat tidak langsung dan kompleks karena dipengaruhi tekanan sistemik. Tekanan-tekanan sistemik ini harus diterjemahkan melalui variabel pengaruh pada level unit seperti pada bagan oleh Ripsman berikut:



Gambar 1. 2. Bagan pengaruh variabel unit pada realisme neoklasik.

Sumber : Neoclassical Realism oleh Norrin Ripsman (2016)

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar 1.3., Ripsman menambahkan apabila kita berangkat dari persepsi neorealisme (realisme struktural), sistem

internasional menyediakan informasi kepada negara tentang tantangan dan peluang eksternal yang hadir dan negara akan memberi respon berdasarkan stimuli tersebut. Realisme neoklasik sependapat dengan pandangan ini. Realisme neoklasik juga melihat sistem internasional sebagai sistem yang bersifat struktural. Namun, realisme neoklasik menilai struktur saja tidak cukup karena tidak semua negara berperilaku seragam/*like-unit* (Rosyidin, 2020). Kerangka realisme neoklasik oleh Ripsman melihat sistem internasional merupakan lingkungan anarki dimana terdapat pula distribusi kekuasaan (kapabilitas material berupa militer dan ekonomi). Terdapat faktor-faktor seperti geografi dan teknologi yang mempengaruhi distribusi tersebut dan dikategorikan Ripsman sebagai '*structural modifier*' Ripsman et al. (2016). Sistem internasional kemudian memunculkan stimuli-stimuli sistemik atau sinyal yang menjadi variabel independen dalam kerangka realisme neoklasik oleh Ripsman.

Stimuli-stimuli ini yang akan direspon oleh kebijakan luar negeri yang diambil negara. Berbeda dengan realisme struktural, pada realisme neoklasik, stimuli-stimuli ini akan disaring oleh faktor-faktor level unit yang merupakan *intervening variables* atau variabel penyela. Ripsman melihat variabel penyela sebagai variabel yang berperan membentuk '*transmission belt*' dengan fungsi menyaring, menerjemahkan dan terkadang mendistorsi sinyal-sinyal dari lingkungan internasional sebelum menghasilkan sebuah *output* kebijakan luar negeri. Ripsman berargumen bahwa meskipun tekanan-tekanan sistemik seperti

pergeseran *balance of power* atau kompetisi ekonomi, terlalu ambigu untuk menjelaskan sebuah fenomena kebijakan luar negeri secara utuh. Oleh karenanya, karakteristik internal dari negara, yang dibaginya menjadi empat: persepsi pemimpin, kultur strategis, hubungan negara masyarakat, dan institusi domestic, berperan menjadi jembatan dengan faktor-faktor eksternal dalam pembentukan suatu hasil kebijakan luar negeri (*policy output*). Variabel-variabel ini menentukan bagaimana pembuat kebijakan di sebuah negara mempersepsikan ancaman dan kesempatan yang ada serta kemampuan mereka untuk menggali dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki negara untuk merespon sebuah stimuli sistemik.

Terdapat empat unit variabel penela dalam konsep realisme neoklasik oleh Ripsman (2016) yaitu persepsi pemimpin negara, kultur strategis, pola hubungan negara-masyarakat, dan aransemen institusi domestik. Persepsi pemimpin bersifat signifikan karena dapat mempengaruhi proses pertama dari tiga proses *intervening* yaitu persepsi terhadap stimuli sistemik yang masuk. Ripsman memberi label *foreign policy executive* (FPE) terhadap individu-individu yang menduduki posisi utama sebagai pengambil kebijakan individual dalam konteks negara yaitu presiden, perdana menteri, anggota kunci kabinet, para menteri, serta penasihat yang bertanggung jawab dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan (Ripsman et al., 2016). Unit kedua, kultur strategis suatu negara yang dibagi menjadi dua jenis yaitu kultur organisasi (seperti bagaimana militer dan birokrasi terorganisir dalam suatu negara) dan ide lebih luas terkait kultur strategis (kepercayaan yang berakar

kuat, pandangan terhadap dunia, dan ekspektasi bersama sebagai masyarakat secara keseluruhan). Unit ketiga, hubungan antara negara dan masyarakat didefinisikan sebagai karakter dari interaksi antara institusi pusat dan berbagai kelompok ekonomi dan masyarakat. Unit ini terutama berkaitan dengan derajat harmoni antara negara dan masyarakat. derajat harmoni ini berarti sejauh mana masyarakat akan tetap patuh terhadap pemimpin negara ketika terdapat perbedaan pendapat, persaingan distribusi kekuasaan antara koalisi masyarakat dan oposisinya, tingkat kohesi politik dan sosial dalam negara, dan dukungan public terhadap kebijakan luar negeri dan objektif-objektif keamanan nasional secara umum. Lalu secara khusus termasuk pula mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat dan perpecahan yang terjadi serta impaknya terhadap formulasi dan implementasi kebijakan. Unit terakhir yaitu institusi domestik yang berkaitan dengan struktur negara dan institusi politik domestik yang seringkali berpengaruh terhadap sifat relasi antara negara dan masyarakatnya. Institusi formal, rutinitas dan proses organisasi, kelalaian birokratik, dipengaruhi oleh ketentuan konstitusi. Akibatnya, institusi domestik juga berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan, tahapan-tahapannya, dan siapa yang dapat bertindak sebagai 'pemegang hak veto'. Hal ini menunjukkan struktur institusional dapat memiliki dampak penting terhadap kemampuan negara dalam merespon tekanan sistemik.

Realisme neoklasik sebagai bagian dari paradigma realis memandang negara sebagai aktor utama dalam politik internasional. Yang membedakan dengan

aliran realis lainnya adalah, realisme neoklasik melihat kebijakan luar negeri suatu negara dibuat oleh pemimpin-pemimpin dan elit politik negara tersebut sehingga perspektif mereka terhadap kekuatan relatif negara perlu diperhitungkan. Ini juga menjadi kritik ahli realisme neoklasik terhadap neorealis yaitu negara tidak selalu dapat menerima stimuli sistemik secara tepat atau sistem internasional tidak selalu memberikan sinyal-sinyal jelas terkait ancaman dan peluang. Kalevi Holsti menjelaskan dalam tulisannya '*Concept of Power in the Study of International Relations*' (1964), kekuatan dan pengaruh mungkin dapat ditelaah secara cukup objektif oleh ahli dan negarawan. Namun demikian, yang lebih penting dalam hubungan internasional adalah persepsi pembuat kebijakan terhadap hal-hal tersebut. Ini alasan mengapa negara-negara melakukan investasi jutaan dolar dalam system intelegensi mereka: untuk memaksimalkan akurasi perhitungan kekuatan dan ancaman secara relatif dibandingkan dengan kemampuan dan intensi negara lain terhadap mereka.

1.7. OPERASIONALISASI KONSEP

1.7.1. Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri

Berdasarkan buku Foreign Policy oleh Oxford University Press (Smith et al., 2016), kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai strategi atau pendekatan yang ditentukan oleh pemerintah nasional untuk mencapai target nasional dalam relasi negara dengan entitas eksternal. Definisi klasik disediakan oleh Walter

Carlsnaes yaitu ‘aksi-aksi yang diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan yang dinyatakan secara eksplisit, komitmen-komitmen dan/atau direktif-direktif, dan dikejar oleh representasi pemerintah yang bertindak atas nama komunitas berdaulat, ditujukan pada suatu objektif, kondisi dan aktor-aktor baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang ingin mereka pengaruhi dan berada di luar legitimasi territorial mereka.’ (Carlsnaes, 2002). Pengkaji keilmuan dan analisis kebijakan luar negeri, James N. Rosenau melihat analisis kebijakan luar negeri sebagai ‘*bridging discipline*’ atau disiplin ilmu penjemputan yang harus melibatkan politik pada level nasional dan internasional.

Dalam kaitannya dengan realisme neoklasik, pembentukan kebijakan luar negeri sebagai *two-level process* atau proses dua tingkat. Realisme neoklasik melihat negara membentuk kebijakan luar negeri mereka dengan merespon hambatan dan kesempatan sistem internasional, namun respon mereka dibentuk oleh variabel antara sebagai unit determinan dan penyaring yang terdapat pada level domestik. Inkorporasi variabel ideasional kultural domestik ke dalam analisis menyebabkan realisme neoklasik dapat menelaah konteks historis dan spesifik yang menyediakan kerangka penjelasan multi dimensi strategi negara terhadap kebijakan internasional (Rose, 1998).

Dari kacamata realisme neoklasik, kebijakan luar negeri Prancis tidak bergerak di ruang hampa. Perubahan posisi Prancis terhadap EGD merupakan hasil dari pertemuan atau tarik ulur tekanan sistem internasional dan dinamika domestik.

Seperti pada paradigma realisme lainnya, Prancis bersikap rasional terhadap stimuli sistemik berupa kompetisi ekonomi dengan negara-negara industri besar lainnya dengan mengajukan sebuah bentuk simplifikasi regulasi kepada Uni Eropa. Realisme neoklasik menjelaskan dasar tindakan rasional Prancis ini menggunakan empat variabel penyela pada level domestik. Dari sudut pandang analisis kebijakan luar negeri, proposal jeda regulasi adalah sebuah instrumen diplomasi untuk mengamankan kedaulatan ekonomi Prancis tanpa harus keluar dari komitmen regional Uni Eropa.

Prancis sebagai negara anggota Uni Eropa memiliki kewajiban untuk bersinergi dalam pencapaian target EGD yang secara horizontal menyentuh mayoritas sektor ekonomi dan industri. Ketika sebuah regulasi UE menghasilkan dampak yang tidak diinginkan, dan dalam kasus ini berpengaruh terhadap stabilitas nasional, Prancis dapat menyampaikan aspirasinya. Surat atau proposal jeda regulasi dari Prancis kepada UE merupakan suatu bentuk aspirasi yang disalurkan Otoritas Prancis yang dikoordinasikan oleh *Secretariat General des Affaires Europeennes* (SGAE) yang merupakan badan di bawah Perdana Menteri Prancis yang bertugas menyelaraskan posisi seluruh kementerian Prancis sebelum dibawa ke tingkat Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa proposal/keputusan kebijakan ini merupakan kepentingan nasional dari Prancis. Dalam surat tersebut, Otoritas Prancis menyebut Komisi Eropa yang di dalam tata kelola Uni Eropa merupakan satu-satunya badan yang memiliki ‘hak inisiatif legislatif’, yaitu hak untuk

mengajukan sebuah proposal perubahan atau bentuk instrumen hukum baru dalam rangka melindungi kepentingan Uni Eropa (European Commission, n.d.)

1.7.2. Stimuli Sistemik

Ripsman (2016) melihat stimuli sistemik sebagai awal mula dari proses terbentuknya kebijakan luar negeri. Stimuli sistemik merupakan input berupa tantangan dan peluang yang bersifat eksternal dan diciptakan oleh sistem internasional serta memberi parameter terkait apa yang bisa atau harus dilakukan negara untuk memastikan keamanan nasional (Ripsman et al., 2016). Berbeda dengan pandangan neorealisme atau realisme struktural yang melihat bahwa stimuli sistemik secara pasti menentukan bagaimana suatu negara bertindak, Ripsman melihat stimuli sebagai sumber informasi bagi *state*. Informasi tersebut berisi distribusi kekuatan materil secara relatif seperti perputaran keseimbangan perdagangan global dan peningkatan kekuatan pertahanan rival.

Berdasarkan topik yang diangkat, stimuli sistemik adalah pergerakan distribusi kekuasaan dalam bentuk ekonomi akibat adanya persaingan industri dan pergeseran kekuatan ekonomi pada level internasional. Stimuli ini ditangkap oleh pemerintah Prancis sebagai ancaman ekonomi nasional dan regional. Dalam proposal yang dibuat oleh Otoritas Prancis, Prancis menunjuk stimuli sistemik tersebut dengan merujuk terhadap penelitian mantan direktur Bank Eropa, Mario Draghi terkait tertinggalnya kompetitivitas UE dibanding dua kompetitornya yaitu

AS dan Cina (Draghi, 2024) ditambah pengaruh ‘regulasi berlebih’ atau ‘*gold-plating*’ oleh UE terhadap perusahaan dan pelaku bisnis.

1.7.3. Persepsi atas Stimuli Sistemik

Di dalam konsepsi realisme neoklasik, negara akan memutuskan suatu kebijakan luar negeri berdasarkan input atau stimuli sistemik yang ada. Stimuli sistemik ini akan melewati proses internal dimana ia diolah oleh persepsi negara yang dipengaruhi oleh persepsi pemimpin dan kultur strategis sehingga memberikan makna dan prioritas terhadap poin-poin stimuli sistemik. Oleh karenanya, persepsi setiap negara bersifat subjektif dan proses pengolahan stimuli juga dibentuk oleh faktor-faktor unit seperti kultur strategis dan citra pemimpin. Hal ini berarti realisme neoklasik melihat negara bereaksi terhadap ‘*perceived stimuli*’ dan karenanya stimuli yang sama bisa mendapat reaksi yang berbeda dari dua negara berbeda. Persepsi juga memungkinkan terjadinya misinterpretasi terhadap stimuli dan menyebabkan reaksi berlebihan, kurangnya reaksi, atau kesalahan reaksi oleh negara.

1.7.4. Persepsi Pemimpin

Variabel domestik pertama menurut kerangka Ripsman adalah persepsi pemimpin atau *Foreign Policy Executive* (FPE). FPE adalah tokoh-tokoh yang berada pada kepemimpinan pusat suatu negara dan mengemban peran utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri memiliki akses terhadap informasi privat dan

monopoli terhadap aktivitas dan investigasi intelegensia luar negeri. Oleh karenanya, FPE menjadi aktor penting untuk ditelaah ketika hendak menjelaskan suatu kebijakan luar negeri dan penyesuaian strategis (Ripsman et al., 2016).

Persepsi pemimpin didefinisikan oleh Ripsman sebagai sepaket kepercayaan atau cara pandang, yang disebut sebagai 'citra' seorang, terkait lingkungan internasional. Secara general, setiap orang memiliki sebuah set nilai inti, kepercayaan, dan citra yang mengarahkan mereka dalam berinteraksi dengan dunia luar serta pemahaman mereka akan hal tersebut. 'Citra' ini bersifat terpersonalisasi dan terbentuk berdasarkan pengalaman yang dialami serta nilai yang dipegang terdahulu. Pengalaman dan nilai juga merepresentasikan '*core belief*' yang tidak secara mudah diubah. Setelah terbentuk, *core belief* berperan sebagai filter kognitif yang menginformasikan bagaimana pemimpin memproses informasi: yang mereka perhatikan; yang mereka acuhkan; dan bagaimana mereka memahami sinyal, informasi, serta kejadian. Segala informasi yang masuk tentang dunia luar akan melewati filter kognitif seorang pemimpin dan membentuk persepsi yang bias dan terpersonalisasi terhadap stimulus eksternal. Hasilnya, pemimpin-pemimpin akan bereaksi berbeda pada tantangan dan kesempatan internasional tergantung pada citra diri mereka.

Dalam penelitian ini, doktrin kedaulatan Eropa merupakan cara pandang Emmanuel Macron terhadap posisi Prancis dan Eropa dalam persaingan global. Menurut kerangka Ripsman, persepsi negara terhadap suatu stimuli sistemik

terbentuk salah satunya oleh bagaimana pemimpin mempersepsikan ancaman tersebut. Macron tidak melihat EGD sebagai sekedar isu ekologi namun juga isu kedaulatan karena interpretasinya terhadap berkembangnya industri AS dan Cina sebagai ancaman terhadap industri Prancis dan Uni Eropa. Selain itu, terdapat konsistensi dalam penggunaan istilah ‘jeda regulasi’ dan ‘kedaulatan Eropa’ dalam pidato-pidato Emmanuel Macron dengan tindakan politiknya melalui proposal Otoritas Prancis ke Komisi Eropa.

1.7.5. Kultur Strategis

Pada sub bab 1.6. telah disebutkan bahwa Ripsman membagi strategis menjadi dua yaitu kultur organisasi/birokrasi dan juga kultur berupa kepercayaan dan cara pandang masyarakat terhadap dunia secara general. Tulisan Elizabeth Kier terkait militer Prancis pada periode *interwar*, yaitu periode 20 tahun di antara berakhirnya perang dunia pertama dan sebelum dimulainya perang dunia kedua (Kier, 1995) merupakan salah satu contoh pengamatan terhadap kultur strategis organisasi. Kier melihat kultur organisasi militer Prancis menerapkan doktrin yang cenderung defensif bagaimanapun keadaan yang mereka hadapi. Kier berargumen hal ini bukan dikarenakan ancaman kekuatan militer Jerman namun lebih karena adanya pertarungan antara sayap kiri dan sayap kanan dalam negeri Prancis atas distribusi kekuatan politik domestik. Secara spesifik, petinggi sayap kiri menentang angkatan bersenjata karena kekhawatiran mereka terhadap sifat reaksionari sayap kanan. Kier juga melihat bahwa doktrin militer jarang sekali merupakan respon

terkalkulasi dari lingkungan luar dan seringkali merupakan pandangan pembuat kebijakan dan sipil terhadap peran militer di dalam masyarakat. Kier menambahkan bahwa organisasi militer tidak serta merta memilih doktrin ofensif. Kier berpendapat, pilihan antara doktrin militer ofensif atau defensif paling baik dipahami melalui perspektif kultural.

Pada kedua model, kultur strategis atau ekspektasi kolektif membentuk pemahaman strategis dari pemimpin politik, elit sosial, dan bahkan masyarakat umum. Melalui proses sosialisasi dan institusionalisasi (dalam bentuk aturan dan norma), asumsi kolektif dan ekspektasi menjadi tertanam dan dalam beberapa aspek membatasi perilaku dan kebebasan negara dalam menentukan pilihan-pilihan strategis yang baik dan buruk, bahkan dalam lingkungan dunia yang anarkis. Ripsman menambahkan, ideologi dominan dapat mempengaruhi sikap negara terhadap peristiwa internasional. Pembuat kebijakan dapat 'terjebak' oleh kultur strategis yang mencegah mereka memenuhi tuntutan internasional dan memilih perilaku yang bersifat self-defeating.

Dalam mendefinisikan kultur strategis suatu negara, Ripsman menekankan bahwa budaya adalah suatu hal yang bersifat menetap. Pada studi kasus ini, 'Gaullisme' yang sejak perang dunia kedua merupakan identitas geopolitik dan patriotisme Prancis, ditelaah sebagai variabel penyela kultur strategis. Penentuan Gaullisme sebagai variabel penyela dalam penelitian ini didasari penerapan ide-idenya yang tetap bertahan dan konsisten lintas rezim, dari kepemimpinan

Jendral/Presiden de Gaulle hingga Emmanuel Macron. Gaullisme berperan sebagai filter yang mengubah tekanan kompetisi global dari stimuli sistemik menjadi sikap defensif Prancis terhadap implementasi EGD.

Gaullisme memiliki makna dan keyakinan bahwa Prancis harus menjadi kekuatan besar yang mandiri (konsep '*grandeur*' dalam Gaullisme). Di dalam konteks kebijakan luar negeri dan EGD, Prancis tidak ingin transisi ramah lingkungan Uni Eropa meletakkan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya hanya sebagai pengikut atau bergantung dengan impor teknologi dan produk Cina/AS. Proposal jeda regulasi adalah cara Prancis untuk memastikan bahwa transisi ekologi tidak mengorbankan kekuatan industri mereka yang menjadi salah satu tumpuan kebesaran dan kemandirian Prancis (*grandeur*).

1.7.6. Pola Relasi Negara-Masyarakat

Pola relasi negara-masyarakat menunjukkan tingkat harmoni dari hubungan antara negara dan berbagai kelompok ekonomi dan masyarakat. Tingkat harmoni ini penting karena mempengaruhi pola interaksi alami sehari-hari, terutama pada kondisi yang tidak pasti karena adanya konflik yang mempengaruhi mekanisme negara dalam memilih jalan keluar penyelesaiannya. Pola relasi negara-masyarakat berhubungan dengan dinamika koalisi politik domestik hingga kelompok kepentingan sosial-ekonomi dan koalisi dari kelompok kepentingan.

Pada konteks penelitian ini, pola relasi negara-masyarakat akan dilakukan melalui tekanan dari demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok industri dan pekerja agrikultur dengan tuntutan keringanan regulasi lingkungan dalam Common Agricultural Policy (CAP). CAP pertama kali dibentuk pada 1962 dan merupakan kebijakan UE (Pada masa itu European Coal and Steel Community) untuk memastikan produktivitas sektor agrikultur, kesejahteraan pekerja sektor tersebut, dan ketahanan pangan pasca perang dunia kedua (European Parliament, 2021). Seiring waktu, CAP mengalami beberapa reformasi dan memasukkan elemen keberlanjutan lingkungan serta perlindungan area rural dan biodiversitas dalam ketentuan pembiayaan suatu bisnis/kegiatan agrikultur. European Green Deal (EGD) yang diadopsi UE pada 2019 secara fundamental berpengaruh terhadap reformasi terkini CAP, reformasi 2023-2027 (European Council, 2025).

Berdasarkan kerangka realisme neoklasik oleh Ripsman, sebuah fenomena sosial dapat dianggap sebagai variabel penyela jika memiliki kemampuan membatasi otonomi pemerintah (*constraints on state autonomy*). Negara tidak dapat selalu mengejar kepentingan sistemik jika masyarakat menarik dukungan terhadap pemerintahan yang ada. Demonstrasi petani tervalidasi sebagai variabel penyela karena menciptakan biaya politik yang tinggi bagi Emmanuel Macron dan mendorong pemerintahannya untuk mengambil 'jeda' dalam ambisi hijaunya untuk meredam ketidakstabilan di dalam negeri. Korelasi waktu juga berperan penting dalam pengaruh demonstrasi industri agrikultur terhadap pengambilan keputusan

kebijakan luar negeri Prancis. Segera setelah memuncaknya protes, otoritas Prancis merilis proposal teknis yang berisi respon akomodasi terhadap tuntutan petani termasuk penundaan aturan pestisida dan penyederhanaan bantuan CAP. Dalam kerangka realisme neoklasik oleh Ripsman, sebuah relasi negara-masyarakat dianggap sebagai variabel penyela dalam pembentukan keputusan luar negeri negara apabila tekanan masyarakat berhasil mengubah prioritas kebijakan luar negeri.

1.7.7. Institusi Domestik

Institusi domestik merupakan unit ‘filter’ terakhir pada kerangka realisme neoklasik oleh Ripsman. Institusi domestik merupakan regulasi baik yang bersifat formal maupun informal terkait pihak yang berhak mengambil keputusan dan membentuk kebijakan serta bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Pada negara demokrasi, institusi paling penting berkaitan dengan otonomi adalah badan eksekutif baik dalam sistem parlementer, presidensial, atau campuran. Ripsman berpendapat aransemen institusi domestik yang berbeda akan mempengaruhi bagaimana demokrasi memutuskan kebijakan luar negeri mereka (Ripsman et al., 2016). Oleh karenanya, negara-negara demokrasi tidak bisa secara serta merta dikelompokkan menjadi satu dalam analisis institusi domestiknya. Beberapa faktor yang dapat membedakan satu tingkat konsentrasi kekuasaan pada badan eksekutif (dibanding badan lain), relasi eksekutif-legislatif, sistem partai, aturan pemilihan umum, dan apakah sistem elektoral didasarkan pada pengambilan

suara plural atau representasi secara proporsional, serta kualitas pemerintah dan kompetensi administratifnya. Bagi Ripsman, tingkat otonomi struktural *Foreign Policy Executive* (FPE) akan mempengaruhi independensi mereka dari oposisi di badan legislatif dan masyarakat. Variabel-variabel tersebut akan menentukan apakah pemeimpin negara dapat mengontrol kekuatan negara dan apakah negara demokrasi dapat beradaptasi dengan perubahan pada distribusi kekuasaan dalam sistem internasional. Badan eksekutif yang kuat dapat mengejar target kebijakan mereka bahkan ketika dihadapkan dengan oposisi yang kuat.

Pada konteks topik penelitian, analisis akan dilakukan terhadap bagaimana komposisi parlemen nasional Prancis mempengaruhi pergeseran kebijakan luar negeri di bawah pimpinan Emmanuel Macron. Parlemen sebagai institusi formal negara mempengaruhi kekuatan eksekutif mengekstraksi sumber daya. Parlemen Prancis memvalidasi diri sebagai variabel penyela dalam penelitian ini melalui perannya dalam pengawasan penerapan kebijakan Uni Eropa pada tingkat nasional. Pergeseran sikap Prancis di tingkat sistemik (UE) merupakan hasil dari kebuntuan atau tekanan yang terjadi di tingkat institusi formal domestik di parlemen.

Dengan demikian, penggunaan empat variabel penyela domestik untuk menjawab pertanyaan penelitian didasari oleh keperluan melihat sebuah fenomena secara utuh, sebagaimana Ripsman membentuk kerangkanya yaitu untuk menghindari simplifikasi jawaban sebab-akibat tanpa melihat latar yang lebih luas dari suatu kejadian. Dengan menggunakan keempat variabel, analisis dari berbagai

lapisan yaitu individu (persepsi pemimpin), budaya (ide Gaullisme), sosial (demonstrasi), dan institusi domestik (hambatan dari parlemen) dimungkinkan dan dapat menjawab kontradiksi yang ada. Misal, Macron memiliki otonomi tertinggi namun hilangnya dukungan yang ditunjukkan oleh faktor demonstrasi dan oposisi parlemen mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negeri Prancis di bawahnya mengalami pergeseran.

1.8. ARGUMEN PENELITIAN

Proposal '*regulatory break*' oleh Prancis merupakan respon dan motif yang muncul karena adanya tekanan sistemik dari kompetisi perdagangan dengan negara-negara lain terutama negara luar kawasan UE yang memiliki regulasi lingkungan relatif lebih ringan dan dengan subsidi dan biaya produksi yang lebih ringan. Sementara itu, terdapat kondisi sosial politik dalam negeri Prancis yang menciptakan kesempatan dan momen yang tepat bagi Macron untuk menyuarakan gagasan tersebut di ranah regional dan global.

1.9. METODE PENELITIAN

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian kualitatif didesain untuk mengeksplorasi elemen-elemen humanis/manusiawi dalam topik tertentu (Given, 2008). Istilah penelitian eksplanatif mengindikasikan bahwa riset yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan ketimbang semata-merta

mendeskripsikan fenomena yang dibahas (Given, 2008). Menjelaskan terjadinya suatu fenomena dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kejadian dan proses terdahulu yang mendorong hasil berupa fenomena yang hendak dijelaskan, atau disebut juga sebagai eksplanasi kausal. (6 & Bellamy, 2012)

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian berkaitan dengan tempat dilaksanakannya suatu penelitian terkait. Penelitian dilakukan di Semarang, Jawa Tengah.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Prancis terhadap kebijakan lingkungan Uni Eropa terutama pada periode kedua kepemimpinan Emmanuel Macron.

1.9.4. Jenis Data

Data dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Termasuk dalam data primer adalah pernyataan presiden dalam bentuk pidato serta tulisan melalui laman resmi kepresidenan dan pemerintahan Prancis. Sementara data sekunder diperoleh melalui sumber seperti buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, artikel berita dan sumber relevan lainnya.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode *desk research* dengan sumber dan jenis data berbentuk fisik maupun non fisik berupa buku, artikel jurnal, pernyataan resmi institusi pemerintah, dan tulisan ilmiah terdahulu yang diperoleh melalui perpustakaan fisik dan juga sumber daring. Dari sumber-sumber tersebut penulis melakukan kajian literatur. Kajian literatur sebagai sebuah metode merupakan aktivitas survei dari sumber-sumber ilmiah yang bertujuan membangun familiaritas dan pemahaman terhadap suatu topik atau pertanyaan riset (Goertel, 2023). Kajian literatur melibatkan analisis kritis terhadap hubungan berbagai sumber karya ilmiah yang digunakan, menemukan sintesis dan penjelasan dari celah yang ada.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dilakukan melalui dua level yaitu unit-unit perantara pada level internal domestik dan stimuli sistemik pada struktur internasional sesuai dengan kerangka analisis terbentuknya kebijakan luar negeri oleh realisme neoklasik.